



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- **184** /KASN/01/2022 Jakarta, **14** Januari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi dalam
Rangka Mutasi/ Rotasi PPT Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam**

Yth.,
Wali Kota Batam
di
Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B/3103/KP,10.01/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, Hal Usulan Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian dokumen rencana Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi terhadap 27 (dua puluh tujuh) PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yaitu:

No.	Nama/ NIP	Jabatan	SK Jabatan	Ket.
1.	H. JEFRIDIN, M.Pd 196812251998021006	SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM	KPTS.77/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
2	RUDI SAKIYAKITRI, SH, MH; 196506061993031018	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	KPTS.33/BKD/HK /IX/2016 Tgl. 15-09-216	5 Th 2 Bln
3	R. KAMARULZAMAN, SE 196409301985031004	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, DAN POLITK	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
4	ABD.MALIK, SE, M.Si 196607271996031003	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
5	RAJA AZMANSYAH, S.Sos, MT 197011202000031009	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln

No.	Nama/ NIP	Jabatan	SK Jabatan	Ket.
		DAERAH		
6	IR. YUSMASNUR, MT 196303181994021002	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
7	SUHAR, ST 197403162000031003	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
8	DRS. SULEMAN NABABAN 196301121991031008	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
9	DRS.AZMAN, MP 196512121986031028	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	KPTS.78/BKD/HK /XII/2016 Tgl. 30-12-216	4 Th 11 Bln
10	Dr.DIDIKUSMARJADI, Sp. OG, MM 196607311997031007	KEPALA DINAS KESEHATAN	KPTS.23/BKPSD M/HK/III /2017 Tgl. 14-03-2017	4 Th 08 Bln
11	MARDANIS,AMP, SE 196807141988111003	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	KPTS.23/BKPSD M/HK/III /2017 Tgl. 14-03-2017	4 Th 08 Bln
12	HASYIMAH, S.Pd, MM 196306071986062003	KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KPTS.23/BKPSD M/HK/III /2017 Tgl. 14-03-2017	4 Th 08 Bln
13	DRS. ERYUDHI APRIADI 196904251989091001	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	3/KPTS.80/BKPS DM/HK/IX/2018 04-11-2018	3 Th 01 Bln
14	HENDRI ARULAN 196707191991031009	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	1/KPTS.80/BKPS DM/HK/XI/2018 04-11-2018	3 Th 01 Bln
15	DR. HERMAN, S.STP,M.Si 197705121996121001	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37/BKPSDM/HK/I I/2018 Tgl.26-03-2018	3 Th 08 Bln
16	DRS. YUSFA HENDRI, M.Si 196909131990021002	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1/KPTS.65/BKPS DM/HK/VI/2018 Tgl.26-06-2018	3 Th 05 Bln
17	PEBRIALIN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	1/KPTS.65/BKPS DM/HK/VI/2018	3 Th

No.	Nama/ NIP	Jabatan	SK Jabatan	Ket.
	196301181992031008	PEMBANGUNAN	Tgl.26-06-2018	05 Bln
18	FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si 196804121089091002	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KPTS.1/BKPSDM /HK//2019 11-01-2019	2 Th 10 Bln
19	Drs. ARDIWINATA 1969062919891001	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KPTS.1/BKPSDM /HK//2019 11-01-2019	2 Th 10 Bln
20	DR. AGUSTIAN RIAU, SE, M.Si 196908301992121001	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KPTS.1/BKPSDM /HK//2019 Tgl.11-01-2019	2 Th 10 Bln
21	Drs. SAMUDIN 196510111994031008	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KPTS.1/BKPSDM /HK/I /2019 Tgl. 11-01-2019	2 Th 10 Bln
22	NURZALIE, S.Sos 197302061993111001	KEPALA DINAS PERTANAHAN	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	2 Th 10 Bln
23	Drs. HERIMAN HK 196709081987111001	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	1 Th 11 Bln
24	Dra. HASNAH 196807141989092001	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	1 Th 11 Bln
25	DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 196712241994031009	STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	1 Th 11 Bln
26	AZRIL APRIANSYAH, ST,.MT 197304082002121005	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	1 Th 11 Bln
27	HENDRIANA GUSTINI, S.Sos 196808241990082001	INSPEKTUR DAERAH	KPTS.138/BKPS DMMKP /XII /2019; Tgl. 30-12-2019	1 Th 11 Bln

2. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada angka 3, huruf c poin 1) huruf b) bahwa:

“Untuk mutasi internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi satu tahun sejak dilantik.”

Oleh karena itu apabila Saudara akan melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka mutasi/ rotasi dalam masa kedaruratan COVID-19 terhadap PPT Pratama sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, hanya dapat dilakukan mutasi setelah menduduki jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun sejak dilantik, kecuali sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1), UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

3. Bahwa berkaitan dengan rencana Uji Kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi terhadap PPT Pratama sebagaimana pada poin 1 (satu) **dapat kami setujui**, karena telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020, PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Selanjutnya bahwa uji kompetensi dapat dilakukan melalui penelusuran rekam jejak, wawancara dan *assesment*.
4. Selanjutnya kami persilahkan Saudara untuk menetapkan dan menugaskan **Panitia Seleksi** untuk memulai proses Uji Kesesuaian (*Jobfit*) terhitung sejak terbitnya rekomendasi ini dengan berpedoman kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dan SE Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 99A dan 99B, PP 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah. Bupati/Wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi **Inspektur Daerah** Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 32, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satu wewenang KASN adalah mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT. Sehingga hasil Uji Kesesuaian (*jobfit*) harus disampaikan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
 - a. Berita acara dan nilai peserta tiap tahapannya, beserta rekapitulasi nilai yang ditanda tangani oleh semua anggota Panitia Seleksi.
 - b. Daftar usulan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama yang akan di mutasi ke jabatan baru, berdasarkan kesesuaian kompetensi kandidat dan kualifikasi jabatan.
7. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Uji Kesesuaian (*Jobfit*) tersebut agar tidak dimaksudkan untuk kepentingan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dari jabatannya (*non-job*), tanpa melalui proses yang benar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

8. Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komis Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kepulauan Riau;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.